

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk dapat menjadi peserta Pemilu Tahun 2019, partai Politik harus memenuhi syarat memiliki kepengurusan di 75 % (Tujuh puluh lima Persen) jumlah kabupaten Kota di setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 173 Ayat (2) huruf b dan c Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sementara dalam hal Keanggotaan Partai Politik , untuk dapat menjadi partai politik peserta pemilu tahun 2019 partai politik harus memiliki anggota sejumlah 1/1000 atau 1000 dari jumlah penduduk di Kab/Kota tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam menentukan jumlah anggota minimal KPU Kota Pontianak berpodoman pada SK Nomor 165/ HK 03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang jumlah kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah penduduk kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagaimana yang telah dirilis oleh kemendagri tentang Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dimana jumlah penduduk Kota Pontianak adalah 655.572 Jiwa. Sehingga jika ditarik berdasarkan Pasal 173 ayat (2) huruf F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka jumlah minimal anggota partai politik di Kota Pontianak Minimal 655 Anggota

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon peserta Pemilu di Kota Pontianak adalah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang dan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selain itu rangkaian pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dimaksudkan dapat menciptakan suasana politik dan demokrasi yang baik di Indonesia sehingga kedepannya kualitas hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 juga lebih baik.

C. Ruang Lingkup

Pendaftaran Partai Politik di Kota Pontianak diikuti oleh 19 Partai Politik di Kota Pontianak, namun setelah melaksanakan serangkaian tahapan verifikasi terhadap persyaratan yang diamanatkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum maka jumlah partai Politik yang memenuhi syarat (MS) di tahap akhir hanya 16 Partai Politik. Dalam melaksanakan proses verifikasi baik administrasi, keanggotaan maupun kepengurusan KPU Kota Pontianak membentuk Kelompok Kerja yang masing- masing memiliki tugas tersendiri.

D. Sistematika Laporan

Laporan ini dibuat untuk menjelaskan proses dan tahapan pendaftaran partai politik di Kota Pontianak, dalam hal ini dibagi menjadi beberapa tahapan seperti:

1. Pendaftaran dan Penyerahan Administrasi (Fotocopy E-KTP dan KTA)
2. Penelitian Administrasi dan Kegandaan
3. Penyampaian Hasil penelitian Administrasi
4. Penelitian Faktual Kegandaan
5. Penelitian Administrasi

6. Penelitian dan dan Verifikasi faktual Keanggotaan
7. Penelitian dan dan Verifikasi faktual Kepengurusan
8. Perbaikan Dokumen keanggotaan dan Kepengurusan
9. Penelitian dan Verifikasi Faktual Hasil perbaikan
10. Penyampaian Hasil Penelitian dan Verifikasi Faktual Perbaikan

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 6109)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kade dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296)

6. Keputusan KPU Nomor 165/HK 03.1/Kpt/03/KPU/IX/2018 Tentang jumlah Kabupaten /Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Setiap Provinsi

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilihan umum 2018 di tahun 2018 diawali dengan sosialisasi terkait Undang-Undang dan Peraturan Komisi pemilihan Umum yang mengatur tentang pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017.

1. Pengumuman dan Pendaftaran Partai Politik

Pengumuman dan Pendaftaran dilakukan secara serentak pada tanggal 1-3 Oktober 2017, sementara pendaftaran partai politik di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada 3-16 Oktober 2017 dengan menyerahkan daftar nama anggota partainya dilampiri dengan fotocopy e -KTP dan KTA, berikutnya KPU Kabupaten/Kota akan melaksanakan Penelitian Administrasi dan Faktual terhadap keanggotaan yang diserahkan . Daftar anggota yang diserahkan kepada KPU Kota Pontianak sebelumnya telah diinput pada sistem partai politik (SIPOL) masing-masing partai politik . untuk lebih jelas mengenai pendaftaran dan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU Kota Pontianak, dapat dilihat pad tabel berikut:

a. Tabel Pendaftaran Partai Politik (3-17 Oktober 2017)

NO	NAMA PARPOL	WAKTU KEDATANGAN/PENERIMAAN	JUMLAH SIPOL	JUMLAH YANG DISERAHKAN		STATUS
				SALINAN KTA	KTP	
1	NASDEM	JUMAT, 13 OKTOBER 2017 (PUKUL 08.30)	790	790	790	TT
2	PERINDO	JUMAT, 13 OKTOBER 2017 (PUKUL 10.00)	1.609	1.609	1.609	TT
3	PDI PERJUANGAN	SABTU, 14 OKTOBER 2017 (PUKUL 15.00)	746	746	746	TT
4	GERINDRA	SABTU, 14 OKTOBER 2017 (PUKUL 15.45)	1.086	1.086	1.086	TT
5	PSI (PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA)	MINGGU, 15 OKTOBER 2017 (PUKUL 09.30)	660	660	660	TT
6	GOLKAR	MINGGU, 15 OKTOBER 2017 (PUKUL 12.00)	1.606	1.606	1.606	TT
7	PKS	MINGGU, 15 OKTOBER 2017 (PUKUL 13.30)	1.345	1.345	1.345	TT
8	GARUDA	MINGGU, 15 OKTOBER 2017 (PUKUL 14.47)	677	677	677	TT
9	PPP	SENIN, 16 OKTOBER 2017 (PUKUL 13.00)	813	813	813	TT

10	DEMOKRAT	SENIN, 16 OKTOBER 2017 (PUKUL 16.53)	689	689	689	TT
11	PAN	SENIN, 16 OKTOBER 2017 (PUKUL 19.05)	1.162	1.162	1.162	TT
12	PKPI	SENIN, 16 OKTOBER 2017 (PUKUL 20.23)	870	870	870	TT
13	PBB	SENIN, 16 OKTOBER 2017 (PUKUL 20.49)	767	767	767	TT
14	BERKARYA	SELASA, 16 OKTOBER 2017	680	586	586	TT
15	HANURA	SELASA, 16 OKTOBER 2017	1.283	1.283	1.283	TT
16	PKB	SELASA, 16 OKTOBER 2017	870	870	870	TT
17	REPUBLIK	SENIN, 16 OKTOBER 2017	5	0	0	DIKEMBALIKAN UNTUK DIPERBAIKI
18	IDAMAN	SENIN, 16 OKTOBER 2017	671	0	0	DIKEMBALIKAN UNTUK DIPERBAIKI
19	PIKA	SENIN, 16 OKTOBER 2017	1416	19	19	DIKEMBALIKAN UNTUK DIPERBAIKI

Dari hasil diatas beberapa partai politik dinyatakan tidak lolos pada tingkat nasional (KPU RI) dan kemudian melakukan gugatan ke Bawaslu, dan hasilnya Bawaslu

memengkan sejumlah partai tersebut dengan keputusan memberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran pada tanggal 20-22 November 2018.

2. Pendaftaran Pasca Putusan Bawaslu

Untuk di Kota Pontianak dari 9 partai politik yang diberikan kesempatan untuk mendaftar kembali, 3 Partai Politik mendaftarkan diri di KPU Kota Pontianak, namun 6 Partai politik lainnya tidak mendaftarkan diri. Untuk lebih jelas mengenai tahapan pendaftaran pasca putusan Bawaslu dapat dilihat pada tabel berikut:

b. Tabel Pendaftaran Pasca Putusan Bawaslu (20-22 November 2017)

NO	NAMA PARPOL	WAKTU KEDATANGAN/PENERIMAAN	JUMLAH DI SIPOL	JUMLAH YANG DISERAHKAN			KETERANGAN
				LAMP MODEL F2 PARPOL	SALINAN KTA	KTP	
1	PKPI	SENIN, 16 OKTOBER 2017 (PUKUL 20.23)	870	870	870	870	SUDAH MENYERAHKAN DAFTAR KEANGGOTAAN PADA TANGGAL 16 OKTOBER 2017
2	PBB	SENIN, 16 OKTOBER 2017 (PUKUL 20.49)	767	870	767	767	SUDAH MENYERAHKAN DAFTAR KEANGGOTAAN PADA TANGGAL 16 OKTOBER 2017
3	PIKA	RABU, 22 NOVEMBER 2017 (PUKUL, 22.15)	1.416	724	263	118	DOKUMEN KEANGGOTAAN PARPOL PIKA JUMLAHNYA TIDAK SESUAI DENGAN YANG ADA DI SIPOL
4	IDAMAN	RABU, 22 NOVEMBER 2017 (PUKUL, 22.15)	712	712	712	712	DOKUMEN KEANGGOTAAN JUMLAHNYA SESUAI DENGAN SIPOL

5	REPUBLIK	RABU, 22 NOVEMBER 2017 (PUKUL, 23.45)	660	660	660	660	DOKUMEN KEANGGOTAAN JUMLAHNYA SESUAI DENGAN SIPOL
6	PPPI	TIDAK ADA DATANG	657	-	-	-	
7	PARSINDO	TIDAK ADA DATANG	1	-	-	-	
8	PBI	TIDAK ADA DATANG	3.924	-	-	-	
9	RAKYAT	TIDAK ADA DATANG	660	-	-	-	

Dari Jumlah partai yang mendaftar di KPU Kota Pontianak berjumlah 19 partai Politik, namun yang memenuhi syarat (MS) pada saat pendaftaran hanya 18 Partai Politik, namun secara nasional jumlah partai yang dinyatakan Lolos pendaftaran hanya ada 14 Partai sehingga jumlah partai yang diverifikasi pada tahap selanjutnya ada 14 partai (PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat) sementara PBB dan PKPI di tingkat Nasional dinyatakan tidak lolos namun belakangan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan diverifikasi ulang untuk wilayah yang digugat, dan hasilnya Memenuhi Syarat Untuk mengikuti ikut Pemilihan Umum Tahun 2109.

3. Penelitian Administrasi Dokumen Keanggotaan parpol

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam melaksanakan Penelitian Administrasi memiliki standard operasional prosedur sebagai berikut :

1. KPU Kota Pontianak membentuk tim kerja penelitian administrasi salinan keanggotaan partai politik
2. Tim kerja penelitian administrasi dibagi menjadi 3 (tiga) tim yaitu :
 - Tim A (Fedi,Erwin,Arif)
 - Tim B (Arifin,Wahyu, Maulana Habibi)
 - Tim C (Angga, Ratno, Nuraida, Sam'an)
3. Teknis Kerja
 - a. Masing –masing tim melakukan download Data Unggahan untuk masing-masing Partai Politik dan disimpan dengan nama File *Penelitian Administrasi*.
 - b. Setelah data di download, masing masing tim melakukan Penelitian dengan cara mencocokkan Hardcopy Salinan KTA dan Salinan E-KTP dengan Softcopy yang terdapat dalam SIPOL.
 - c. Menetapkan Daftar Nama di SIPOL dengan ketentuan sebagai berikut:
 - MS : Memenuhi Syarat
 - Angka 1 : Anggota parpol Pekerjaan PNS
 - Angka 2 : Anggota parpol Pekerjaan TNI
 - Angka 3 : Anggota parpol Pekerjaan Polri
 - Angka 4 : Anggota parpol belum usia 17 Tahun / belum menikah
 - Angka 5 : Anggota Partai ganda 1 partai politik

-Angka 6 : Anggota Partai Politik Ganda Antar Partai

-Angka 7 : Salinan KTA dan KTP tidak sesuai dengan Sipol

d. Setelah diberikan kode sebagaimana dimaksudkan diatas, masing-masing tim melakukan upload data ke SIPOL.

e. setelah data berhasil diunggah di SIPOL, maka sassing masing tim akan melakukan pengecekan data yang berpotensi ganda. Untuk lebih kelas mengenai hasil penelitian administrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

c. Tabel 3 Hasil Penelitian Dokumen Keanggotaan Partai Politik di Kota Pontianak

NO	NAMA PARPOL	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI									JUMLAH KTA DAN KTP (LAMP F2 PARPOL)
		MS	ANGKA 1	ANGKA 2	ANGKA 3	ANGKA 4	ANGKA 5	ANGKA 6	ANGKA 7	JUMLAH ANGKA 1 S/D 7	
1	NASDEM										
	A.KEC PTK KOTA	285	1	0	0	0	0	7	1	9	294
	B.KEC PTK BARAT	78	0	0	0	0	0	1	0	1	79
	C. KEC PTK UTARA	64	0	0	0	0	0	4	0	4	68
	D. KEC PTK TIMUR	40	1	0	0	0	0	2	0	3	43
	E. KEC PTK SELATAN	221	0	0	0	0	0	11	3	14	235
	F. KEC PTK TENGGARA	71	0	0	0	0	0	0	0	0	71
		759								31	790
2	PERINDO										
	A.KEC PTK KOTA	158	0	0	0	0	2	16	4	22	180
	B.KEC PTK BARAT	622	0	0	0	0	1	39	18	58	680
	C. KEC PTK UTARA	311	2	0	0	0	2	15	0	19	330
	D. KEC PTK TIMUR	106	0	0	0	0	1	15	0	16	122
	E. KEC PTK SELATAN	150	0	0	0	0	3	14	2	19	169
	F. KEC PTK TENGGARA	119	0	0	0	0	0	7	2	9	128
		1.466								143	1.609
3	PDI PERJUANGAN										
	A.KEC PTK KOTA	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	B.KEC PTK BARAT	104	1	0	0	0	0	0	0	1	105
	C. KEC PTK UTARA	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	D. KEC PTK TIMUR	263	0	0	0	0	0	3	2	5	268
	E. KEC PTK SELATAN	105	1	0	0	0	0	0	4	5	110

	F. KEC PTK TENGGARA	101	0	0	0	0	0	0	2	2	103
		733								13	746
4	GERINDRA										
	A.KEC PTK KOTA	150	0	0	0	0	0	4	1	5	155
	B.KEC PTK BARAT	244	0	0	0	0	0	8	1	9	253
	C. KEC PTK UTARA	278	0	0	0	0	1	6	2	9	287
	D. KEC PTK TIMUR	193	0	0	0	0	0	4	2	6	199
	E. KEC PTK SELATAN	103	0	0	0	0	1	1	1	3	106
	F. KEC PTK TENGGARA	83	1	0	0	0	0	2	0	3	86
		1.051								35	1.086
5	PSI										
	A.KEC PTK KOTA	101	4	0	0	0	0	3	10	17	118
	B.KEC PTK BARAT	219	1	0	0	0	0	26	8	35	254
	C. KEC PTK UTARA	44	0	0	0	0	0	0	10	10	54
	D. KEC PTK TIMUR	56	1	0	0	0	1	4	13	19	75
	E. KEC PTK SELATAN	59	2	0	0	0	0	3	12	17	76
	F. KEC PTK TENGGARA	65	4	0	1	0	1	2	10	18	83
		544								116	660
6	GOLKAR										
	A.KEC PTK KOTA	152	0	0	0	0	0	2	1	3	155
	B.KEC PTK BARAT	84	1	0	0	0	3	4	4	12	96
	C. KEC PTK UTARA	468	0	0	0	0	3	20	54	77	545
	D. KEC PTK TIMUR	507	3	0	0	0	4	8	19	34	541
	E. KEC PTK SELATAN	102	0	0	0	0	0	2	2	4	106
	F. KEC PTK TENGGARA	151	1	0	0	0	0	8	3	12	163
		1.464								142	1.606
7	PKS										
	A.KEC PTK KOTA	266	0	0	0	0	0	4	0	4	270
	B.KEC PTK BARAT	301	0	0	0	0	0	6	0	6	307
	C. KEC PTK UTARA	283	0	0	0	0	0	6	3	9	292
	D. KEC PTK TIMUR	238	0	0	0	0	0	11	0	11	249
	E. KEC PTK SELATAN	146	1	0	0	0	0	8	0	9	155
	F. KEC PTK TENGGARA	68	0	0	0	0	0	3	1	4	72
		1.302								43	1.345
8	GARUDA										
	A.KEC PTK KOTA	54	0	0	0	0	0	3	37	40	94
	B.KEC PTK BARAT	68	0	0	0	0	0	1	42	43	111
	C. KEC PTK UTARA	53	0	0	0	0	0	5	50	55	108
	D. KEC PTK TIMUR	47	0	0	0	0	0	0	33	33	80
	E. KEC PTK SELATAN	99	0	0	0	0	0	6	37	43	142

	F. KEC PTK TENGGARA	86	0	0	0	0	0	8	48	56	142
		407								270	677
9	PPP										
	A.KEC PTK KOTA	132	0	0	0	0	1	5	10	16	148
	B.KEC PTK BARAT	225	0	0	0	0	2	8	5	15	240
	C. KEC PTK UTARA	73	0	0	0	0	1	1	1	3	76
	D. KEC PTK TIMUR	86	0	0	0	0	2	12	3	17	103
	E. KEC PTK SELATAN	63	0	0	0	0	1	4	3	8	71
	F. KEC PTK TENGGARA	165	0	0	0	0	0	3	7	10	175
		744								69	813
10	DEMOKRAT										
	A.KEC PTK KOTA	103	0	0	0	0	0	11	3	14	117
	B.KEC PTK BARAT	197	1	0	0	0	0	8	0	9	206
	C. KEC PTK UTARA	271	0	0	0	0	0	7	8	15	286
	D. KEC PTK TIMUR	13	0	0	0	0	0	0	2	2	15
	E. KEC PTK SELATAN	57	0	0	0	0	0	0	4	4	61
	F. KEC PTK TENGGARA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		646								44	690
11	PAN										
	A.KEC PTK KOTA	247	0	0	0	0	0	22	44	66	313
	B.KEC PTK BARAT	88	0	0	0	0	4	7	51	62	150
	C. KEC PTK UTARA	150	0	0	0	0	0	6	27	33	183
	D. KEC PTK TIMUR	96	0	0	0	0	0	7	32	39	135
	E. KEC PTK SELATAN	126	0	0	0	0	0	8	87	95	221
	F. KEC PTK TENGGARA	90	1	0	0	0	9	6	54	70	160
		797								365	1.162
12	BERKARYA										
	A.KEC PTK KOTA	240	8	0	0	0	1	18	0	27	267
	B.KEC PTK BARAT	31	1	0	0	0	0	1	0	2	33
	C. KEC PTK UTARA	133	0	0	0	0	0	1	0	1	134
	D. KEC PTK TIMUR	177	1	0	0	0	12	0	0	13	190
	E. KEC PTK SELATAN	51	1	0	0	0	0	1	0	2	53
	F. KEC PTK TENGGARA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		635								45	680
13	HANURA										
	A.KEC PTK KOTA	28	0	0	0	0	28	0	112	140	168
	B.KEC PTK BARAT	31	0	0	0	0	50	0	139	189	220
	C. KEC PTK UTARA	97	0	0	0	0	47	0	89	136	233
	D. KEC PTK TIMUR	24	0	0	0	0	25	0	62	87	111
	E. KEC PTK SELATAN	171	16	0	1	0	107	1	138	263	434
	F. KEC PTK TENGGARA	24	0	0	0	0	61	0	32	93	117
		375								908	1.283

14	PKB										
	A.KEC PTK KOTA	221	8	0	0	0	1	5	5	19	240
	B.KEC PTK BARAT	61	1	0	0	0	1	1	7	10	71
	C. KEC PTK UTARA	252	0	0	0	0	0	5	27	32	284
	D. KEC PTK TIMUR	187	0	0	0	0	0	5	18	23	210
	E. KEC PTK SELATAN	5	0	0	0	0	1	1	2	4	9
	F. KEC PTK TENGGARA	53	0	0	0	0	3	0	0	3	56
		779								91	870

Data diatas adalah verifikasi administrasi tahap awal dimanapun hanya ada 14

Partai politik yang dilakukan penelitian administrasi sementara 2 partai politik lainnya yaitu PKPI dan PBB dilakukan verifikasi administrasi pada tahap sebelumnya. Dari hasil Penelitian administrasi di atas dilakukan verifikasi Faktual terhadap keanggotaan yang memenuhi syarat (MS) pada penelitian administrasi dengan sampel 10 % dari jumlah keanggotaan yang diserahkan , Namun Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PPU/V/2017 maka sampling keanggotaan partai politik dimungkinkan dengan range sampling 5 %.

4. Verifikasi Faktual Daftar Keanggotaan partai Politik

Komisi pemilihan Umum Kota Pontianak dalam hal penentuan sampling menggunakan metode acak sederhana . Dimana setiap partai akan mencabut nomor yang disediakan (1 sampai 9) setelah itu nomor yang diambil tersebut akan mewakili sampelnya misalkan no 1 akan mewakili sampling dengan nomor urut 1,10,20,30,40 ...dst. sementara opsi kedua yang dikeluarkan pasca putusan MK dimana parpol dimungkinkan untuk memilih sampling 5 % maka urutan sampling yang diberlakukan jika partai mendapatkan nomor undi 1 adalah 1,20,40..... dst. Jumlah sampling setiap partai politik dapat dilihat pada tabel dibawah ini

D. Tabel Jumlah Sampling setiap partai Politik

No	Nama Partai Politik	Syarat Minimal	Jumlah Anggota	Sampling		Pembulatan	Metode Sampling
				10%	5%		
1	NASDEM	655	759		37,95	38	SAMPEL ACAK SEDERHANA
2	PDI-P	655	748		37,4	38	SAMPEL ACAK SEDERHANA
3	GERINDRA	655	1051		52,55	53	SAMPEL ACAK SEDERHANA
4	GOLKAR	655	1465		73,25	74	SAMPEL ACAK SEDERHANA
5	PKS	655	1302		65,1	66	SAMPEL ACAK SEDERHANA
6	PPP	655	763		38,15	39	SAMPEL ACAK SEDERHANA
7	DEMOKRAT	655	690		34,5	35	SAMPEL ACAK SEDERHANA
8	PAN	655	1162		58,1	59	SAMPEL ACAK SEDERHANA
9	HANURA	655	682		34,1	35	SAMPEL ACAK SEDERHANA
10	PKB	655	783		39,15	40	SAMPEL ACAK SEDERHANA
11	PKPI	655	802		40,1	42	SAMPEL ACAK SEDERHANA
12	PBB	655	730		36,5	37	SAMPEL ACAK SEDERHANA
13	PSI	655	660		33	33	SAMPEL ACAK SEDERHANA
14	PERINDO	655	1472	147,2		147	SAMPEL ACAK SEDERHANA
15	GARUDA	655	813	81,3		81	SAMPEL ACAK

							SEDERHANA
16	BERKARYA	655	680		34	34	SAMPEL ACAK SEDERHANA

Dari jumlah sampel diatas maka dilakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan yang telah disampling. Jumlah sampling masing masing partai berbeda tergantung jumlah yang diserahkan dan range sampling yang dipilih apakah 5 % atau 10 Persen. Berikut adalah Hasil Penelitian Faktual Keanggotaan yang dilakukan terhadap anggota yang terpilih sebagai sampling .

Sebelum melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan partai politik, tim verifikasi diberikan pembekalam dalam bentuk Bimbingan Teknis terkait tata cara verifikasi. Adapun tata cara adalah sebagai berikut:

- 1 Petugas Verifikasi Faktual wajib memperkenalkan diri kepada sampling yang namanya tertulis, memberitahukan maksud dan tujuan serta menunjukkan ID Card dan Surat Tugas.
2. Petugas menanyakan Apakah benar nerupakan anggota Partai Politik sebagai mana yang termuat dalam form
3. Apabila Memang Anggota Partai , maka wajib tanda tangan di Form yang telah disediakan dan apabila tidak / Bukan anggota partai juga mengisi form pernyataan
4. Petugas Wajib Meminta Dokumen diri (E-KTP dan KTA) sebagai bukti dan didokumentasikan
- 5 petugas mengisi status hasil verifikasi faktual tersebut pada kolom form yang telah disediakan.

Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan partai Politik dituangkan dalam Berita Acara KPU

Kota Pontianak Nomor I/BA/6171/KPU-Kot/I/2018 tentang BA Penetapan Hasil verifikasi Keanggotaan partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Pontianak dan Untuk mengetahui hasil Verifikasi Keanggotaan Parpol dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Hasil Penelitian Faktual Keanggotaan partai Politik

No	Nama Partai Politik	Syarat Minimal	Jumlah Anggota	VERIFIKASI AWAL		VERIFIKASI PERBAIKAN		JUML MS	PROYEKSI JUMLAH ANGGOTA YANG MS	STATUS
				MS	TMS	MS	TMS			
1	NASDEM	655	759	33	5			33	660	MS
2	PDI-P	655	748	38	0			38	745	MS
3	GERINDRA	655	1051	53	0			53	1050	MS
4	GOLKAR	655	1465	54	20			54	1080	MS
5	PKS	655	1302	58	8			58	1160	MS
6	PPP	655	763	39	0			39	763	MS
7	DEMOKRAT	655	690	34	1			34	680	MS
8	PAN	655	1162	39	20			39	780	MS
9	HANURA	655	682	35	0			35	700	MS
10	PKB	655	783	37	3			37	740	MS
11	PKPI	655	802	42	0			42	800	MS
12	PBB	655	730	36	1			36	720	MS
13	PSI	655	660	21	45	27	13	48	665	MS
14	PERINDO	655	1472	94	53			94	940	MS
15	GARUDA	655	813	19	62	29	0	48	750	MS
16	BERKARYA	655	680	16	52	37	0	53	670	MS

5. Verifikasi faktual Kepengurusan, keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor.

Bersamaan dengan Penelitian Keanggotaan Partai Politik, KPU Kota Pontianak juga membuat Tim Verifikasi Kepengurusan inti yang sesuai SK Partai, Keterwakilan Perempuan dalam Struktur Kepengurusan partai dan Domisili Kantor Partai Politik yang mana hal ini juga akan menentukan apakah partai tersebut Memenuhi Syarat atau tidak sebagai Partai Politik Peserta pemilu 2019.

Hasil dari Penelitian Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Politik serta keanggotaan partai Politik menyatakan 16 Partai Politik Memenuhi Syarat (MS) dalam keempat Hal tersebut, meski ada 3 Partai (PSI, Garuda, Berkarya harus melakukan perbaikan pada daftar keanggotaan sebelum dinyatakan MS pada tahap berikutnya. Hasil verifikasi kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor tersebut dituangkan dalam BA Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 6/BA/6171/KPU-Kot/I /2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 Tingkat Kota Pontianak. Untuk lebih jelas mengenai hasil Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon peserta Pemilu 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

E. Tabel Hasil Pendaftaran dan verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta pemilu tahun 2019.

No	Nama Partai Politik	Elemen Partai Politik Calon Peserta pemilu Tahun 2019 yang di Verifikasi Faktual				Status	Keterangan
		Keberadaan Pengurus Inti	Keterwakilan 30 % Perempuan	Domisili Kantor Tetap	Keanggotaan Parpol		
1	NASDEM	MS	MS	MS	MS	MS	
2	PDI-P	MS	MS	MS	MS	MS	
3	GERINDRA	MS	MS	MS	MS	MS	

4	GOLKAR	MS	MS	MS	MS	MS	
5	PKS	MS	MS	MS	MS	MS	
6	PPP	MS	MS	MS	MS	MS	
7	DEMOKRAT	MS	MS	MS	MS	MS	
8	PAN	MS	MS	MS	MS	MS	
9	HANURA	MS	MS	MS	MS	MS	
10	PKB	MS	MS	MS	MS	MS	
11	PKPI	MS	MS	MS	MS	MS	
12	PBB	MS	MS	MS	MS	MS	
13	PSI	MS	MS	MS	MS	MS	MS Setelah Melakukan Perbaikan daftar Keanggotaan
14	PERINDO	MS	MS	MS	MS	MS	
15	GARUDA	MS	MS	MS	MS	MS	MS Setelah Melakukan Perbaikan daftar Keanggotaan
16	BERKARYA	MS	MS	MS	MS	MS	MS Setelah Melakukan Perbaikan daftar Keanggotaan

C. MASALAH DAN SOLUSI

Masalah dan solisi yang dihadapi pada proses pencalonan dan verifikasi Partai Politik Calon peserta pemilu 2019 di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

F. Tabel Identifikasi Masalah dan Solusi yang diberikan dalam Proses dan Tahapan Pendaftaran serta Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	TAHAPAN		PERMASALAH HUKUM		MASUKAN /SARAN
1	PENDAFTARAN PARTAI POLITIK	*	PARPOL YANG MENYERAHKAN KEANGGOTAAN PARPOL DI KAB/KOTA TIDAK MERINCI TERKAIT TENTANG JUMLAH ANGGOTA DI TIAP-TIAP KECAMATAN DI SUATU KAB/KOTA, SEDANGKAN UNTUK MODEL TT DI SIPOL MERINCI JUMLAH KEANGGOTAAN UNTUK TIAP TIAP KECAMATAN.	*	SEBAIKNYA ADA HARMONISASI ANTARA KEPUTUSAN KPU NO 174 DENGAN APLIKASI SIPOL TERKAIT SOAL JUMLAH ANGGOTA PARPOL TIAP TIAP KECAMATAN PADA PROSES PENYERAHAN KEANGGOTAAN PARPOL.
2	PENELITIAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK	*	BEBERAPA PARPOL YANG MENYERAHKAN KTP el TIDAK JELAS DAN MENYULITKAN VERIFIKATOR DALAM MELAKUKAN LITMIN.	*	SEBAIKNYA DOKUMEN KEANGGOTAAN KHUSUSNYA KTP DI POTOKOPI WARNA SUPAYA TIDAK MENYULITKAN VERIFIKATOR DALAM MELAKUKAN LITMIN.
		*	DATA ANTARA SIPOL DENGAN DOKUMEN YANG DISERAH PARTAI POLITIK TERJADI KETIDAKSESUAIAN MISALNYA DAFTAR NAMA /LAMP MODEL F2 PARPOL ADA NAMA A TAPI DI DOKUMEN KTP DAN KTA TIDAK ADA NAMA A TERSEBUT	*	SEBAIKNYA INPUT DATA KEANGGOTAAN PARPOL DILAKUKAN DENGAN CERMAT DAN TELITI
		*	DOKUMEN KTP DIGANDAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MINIMAL	*	UNTUK DOKUMEN KTP YANG DISINYALIR SE

			KEANGGOTAAN DI KPU KAB/KOTA.	NGAJA DIGANDAKAN SEBAIKNYA TIDAK DIHITUNG PADA SAAT PARPOL MENYERAHKAN DOKUMEN TERSEBUT/DICORET.
3	VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK	*	TERKAIT TENTANG ORANG YANG TIDAK MENGAKU ANGGOTA PARPOL TERTENTU TETAPI TIDAK MAU TANDA TANGAN DI MODEL F2 PARPOL KENAPA HARUS MS	* SEBAIKNYA BEGITU YBS MENYATAKAN LISAN TIDAK MENGAKU ANGGOTA PARPOL TERTENTU LANGSUNG SAJA STATUSNYA TMS, KARENA INI MEMANG HAK DARI YBS SELAIN ITU JUGA ADA PANWAS LAPANGAN YANG MENJADI SAKSI
		*	KEBANYAKAN ANGGOTA PARTAI POLITIK TIDAK MEMILIKI KTA PARPOL DENGAN BERBAGAI ALASAN	* DILAPANGAN, ANGGOTA PARPOL YANG TIDAK MEMILIKI KTA DIBERI STATUS TMS WALAUPUN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PRIBADI.

D. HASIL TAHAPAN KEGIATAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK

Hasil dari serangkaian kegiatan Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik di Kota Pontianak dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 16/BA/6171/KPU-Kot/II/2018 tanggal 18 february 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi, dan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 Tingkat Kota Pontianak. Dimana jumlah Partai Politik yang Memenuhi Syarat (MS) pada 4 hal yang diverifikasi diatas berjumlah 16 Partai yaitu :Nasdem,PKPI,PBB, Gerindra, PKB,PDI Perjuangan, Golkar , Garuda, Berkarya, PKS, Perindo,PSI,PPP,PAN,Demokrat dan Hanura.

Pontianak, 25 Oktober 2019

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
Kasubbag Hukum

Ttd.

Heri Antoni,S.H